

**TESIS**

**PERAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH  
PERMUKIMAN PESISIR KELURAHAN PANGLI-ALI KABUPATEN  
MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT**

***THE ROLE OF THE COMMUNITY ON THE PROGRAM WITHOUT  
SLUMS IN COASTAL SETTLEMENT MAJENE CITY OF WEST  
SULAWESI PROVINCE***

Disusun dan diajukan oleh

**ADE GUNA SAPUTRA**

**P0521710002**



**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PERKOTAAN  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**PERAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH  
PERMUKIMAN PESISIR KELURAHAN PANGALI-ALI KABUPATEN  
MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Manajemen Perkotaan

Disusun dan diajukan oleh

ADE GUNA SAPUTRA

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PERAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH  
PERMUKIMAN PESISIR KELURAHAN PANGALI-ALI  
KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh

**ADE GUNA SAPUTRA**

**P052171002**

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Manajemen Perkotaan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 12 Oktober 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Ir. Mimi Arifin, M.Si  
Nip.196612181993932001

  
Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA  
Nidk. 8803560018

Ketua Program Studi.  
Manajemen Perkotaan

  
Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT.  
Nip.196305041995121001



Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin  
Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc  
Nip.196703081990031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE GUNA SAPUTRA

Nomor Mahasiswa : P0521710002

Program Studi : Manajemen Perkotaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Juni 2021

Yang menyatakan;



ADE GUNA SAPUTRA

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kemurahan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian Tesis yang berjudul **Peran Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh Permukiman Pesisir Kelurahan Pangali-Ali Kabupaten Majene.**

Pada kesempatan ini penulis turut mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini. Terkhusus kepada orang tua dan saudara penulis, yang selalu mendoakan dan mendukung langkah-langkah penulis hingga saat ini. Dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Dr. Ir. Mimi Arifin, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis dan pembelajaran pada Program Magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Prof. Dr. Ir. Slamet Tri Sutomo, M.S., Dr. Ir. Arifuddin Akil, M.T., Dr. M. Ramli AT, M.Si, selaku penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan tesis ini.
- Dr. Ir. Arifuddin Akil, M.T., selaku ketua program studi Manajemen Perkotaan.
- Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Manajemen Perkotaan Angkatan 2017, yang telah banyak menginspirasi dan berbagi ilmu serta semangat kepada penulis.

- Teman-teman dekat yang secara langsung dan tidak langsung telah banyak menyemangati, menginspirasi, serta membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- Masyarakat Lingkungan Cilallang dan aparat Kelurahan Pangali-ali, yang telah menerima penulis dan bekerjasama dalam menyelesaikan pengumpulan data tesis ini;
- Seluruh pihak Akademik Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah membantu menyelesaikan kebutuhan administrasi penulis.

Makassar, 10 Juni 2021

Penulis

**Ade Guna Saputra**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR DIAGRAM .....	xi
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1. Lingkup Wilayah Studi.....	5
2. Lingkup Materi .....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	6
A. Permukiman .....	6
B. Peran Masyarakat .....	6
C. Bentuk dan Tipe Keterlibatan/peran Masyarakat .....	9
D. Macam-macam Peran dalam Masyarakat .....	11
E. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	14
1. Latar Belakang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ...	14
2. Pengertian Kotaku ( Kota Tanpa Kumuh) .....	16
3. Tujuan Program Kotaku .....	18
F. Penelitian Terdahulu.....	21
G. Kerangka Pikir .....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian .....	27
1. Waktu Penelitian.....	27
2. Lokasi Penelitian.....	27

B. Populasi dan Sampel.....	29
1. Populasi.....	29
2. Sampel .....	29
C. Metode Pengumpulan Data .....	31
D. Teknik Analisis Data .....	32
E. Variabel Penelitian.....	35
F. Defenisi Operasional .....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Kelurahan Pangaliali.....	44
2. Kawasan Permukiman Pesisir Lingkungan Cilallang.....	48
B. Program KOTAKU Lingkungan Cilallang .....	49
1. Karakteristik Kawasan Kumuh Lingkungan Cilallang.....	49
2. Penanganan Kawasan .....	51
C. Karakteristik Responden.....	51
1. Jenis Kelamin.....	52
2. Usia Responden.....	52
3. Tingkat Pendidikan.....	53
4. Jenis Pekerjaan.....	53
D. Karakteristik Masyarakat Permukiman Pesisir Cilallang .....	54
E. Bentuk dan Peran Masyarakat.....	55
1. Peran dalam Pengambilan Keputusan .....	56
2. Keikutsertaan dalam Pelaksanaan .....	67
3. Pemanfaatan Hasil Pembangunan .....	76
4. Pemeliharaan dan Pengawasan.....	79
5. Bentuk dan Tingkat Peran.....	84
F. Indikator Dan Tingkat Kepentingannya .....	86
G. Strategi Keberlanjutan Peran Masyarakat Cilallang Pangali-ali.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
A. KESIMPULAN .....	99
B. SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	102



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 2. Variabel Penelitian .....	36
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Pangali-ali.....	46
Tabel 4. Jumlah Penduduk Lingkungan Cilallang.....	46
Tabel 5. Profil Kumuh Kawasan Permukiman .....	49
Tabel 6. Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Lingkungan Cilallang .....	50
Tabel 7. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 8. Responden Berdasarkan Usia .....	52
Tabel 9. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 10. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	53
Tabel 11. Indikator Dan Tingkat Kepentingan .....	86
Tabel 12. Tingkat Kepentingan .....	87
Tabel 13. Komponen SWOT Internal dan Eksternal.....	92
Tabel 14. IFAS SWOT .....	93
Tabel 15. EFAS SWOT.....	94
Tabel 16. Matriks SWOT.....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Lokasi Penelitian (Kelurahan Pangli-ali Lingkungan Cilallang Kab.Majene).....	29
Gambar 2.	Peta Kawasan Permukiman Lingkungan Cilallang .....	49
Gambar 3	Masyarakat Pesisir Lingkungan Cilallang.....	56
Gambar 4	Pengelolaan Rumput Laut Oleh Istri Nelayan .....	56
Gambar 5	Masyarakat Permukiman Lingkungan Cilallang .....	91

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Distribusi Persepsi terhadap Pengetahuan terkait Program KOTAKU .....	57
Diagram 2. Distribusi Persepsi terhadap Lama Pengetahuan terkait Program KOTAKU.....	59
Diagram 3. Distribusi Persepsi terhadap Intensitas Mengikuti Rapat .....	61
Diagram 4. Distribusi Persepsi terhadap Keterlibatan Pemberian Informasi.....	63
Diagram 5. Distribusi Persepsi terhadap Peran dalam Bentuk Ide .....	65
Diagram 6. Distribusi Persepsi terhadap Peran Ide yang Diimplementasikan ....	66
Diagram 7. Distribusi Persepsi terhadap Peran Dalam Bentuk Keuangan .....	68
Diagram 8. Distribusi Persepsi terhadap Kepedulian .....	70
Diagram 9. Distribusi Persepsi terhadap Peran Sumbangsi Barang.....	71
Diagram 10. Distribusi Persepsi terhadap Intensitas Peran Waktu.....	75
Diagram 11. Distribusi Persepsi terhadap Intensitas Peran Mingguan .....	76
Diagram 12. Distribusi Persepsi terhadap Manfaat Terhadap Perubahan Lingkungan .....	78
Diagram 13. Distribusi Persepsi terhadap Manfaat .....	79
Diagram 14. Distribusi Persepsi terhadap Keikutsertaan dalam Memelihara .....	82
Diagram 15. Distribusi Persepsi terhadap Keikutsertaan dalam Mengawasi .....	84

## ABSTRAK

**ADE GUNA SAPUTRA**, Peran Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Permukiman Pesisir Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. (dibimbing oleh Mimi Arifin dan Shirly Wunas)

Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten Majene melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), untuk peningkatan kualitas hunian perkotaan. Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Pangali-ali memiliki luas sebesar 17,20 Ha, termasuk dalam kategori kumuh berat dan merupakan kawasan prioritas dalam Program Kotaku kabupaten Majene. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk dan peran masyarakat dalam Program Kotaku di kawasan permukiman pesisir, dan menentukan strategi keberlanjutan peran masyarakat purna pelaksanaan Program Kotaku. Teknik pengambilan data menggunakan *simple random sampling* yang di lengkapi dengan kusioner jumlah sampel sebanyak 80 kepala keluarga. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk dan peran masyarakat wilayah pesisir pada program kota tanpa kumuh, dan analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*), untuk menetapkan strategi keberlanjutan peran masyarakat purna Program Kotaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat pada Program Kotaku dalam bentuk pengambilan keputusan, menunjukan kurang lebih setengah dari jumlah kepala keluarga yang aktif mengikuti rapat Program Kotaku dan memberikan informasi tentang isu sosial, ekonomi dan lingkungannya. Peran masyarakat yang aktif dalam bentuk pelaksanaan/keterlibatan langsung dalam kegiatan kerja, mendekati jumlah kepala keluarga yang sama dengan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Peran masyarakat dalam bentuk pemanfaatan program, menunjukkan nilai positif. Sebagian besar penduduk sudah menggunakan air bersih, drainase, jalan dan MCK. Aspek pengelolaan sampah belum mendapat perhatian masyarakat. Bentuk pemeliharaan dari peran masyarakat juga menunjukan nilai positif, dampak pada kebersihan jalan, drainase dan MCK. Strategi keberlanjutan peran masyarakat purna pelaksanaan program kotaku adalah meneruskan peran masyarakat dengan kerja sama lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan memanfaatkan bantuan desa, dalam bentuk pemeliharaan kebersihan lingkungan, dari aspek persampahan, drainase, MCK dan meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah.

Kata kunci : Peran masyarakat, Program Kotaku

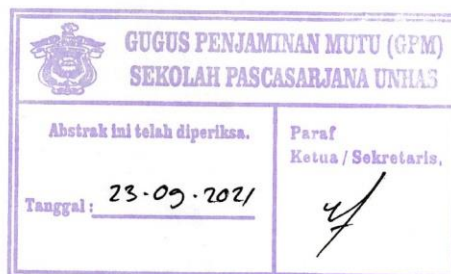
	
<b>GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS</b>	
Abstrak ini telah diperiksa.	Paraf Ketua / Sekretaris,
Tanggal: <u>23.09.2021</u>	

## ABSTRACT

**ADE GUNA SAPUTRA**, *The Role of the Community On The Program Without slums, in Coastal Settlement, Majene City of West Sulawesi Province (Supervised by Mimi Arifin and Shirly Wunas)*

The Ministry of Public Works and Human Settlements, Directorate General of Human Settlements, initiated a collaborative model with the Majene district government through the City Without Slums (Kotaku) Program, to improve the quality of urban housing. The slum area in Pangali-ali Village has area of 17.20 hectares, is included in the heavy slum category and is a priority area in the Kotaku Program of Majene district. The purpose of this study is to analyze the shape and role of the community in the Kotaku Program in coastal settlement areas, and determine a strategy for the sustainability of the community's role after the implementation of the Kotaku Program. The data collection technique applied simple random sampling which was completed questionnaires by which a sample of 80 families. The data analysis technique used is descriptive qualitative to identify the shape and role coastal communities in the city program without slums, and SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), to determine a strategy for the sustainability of the role of the community after the Kotaku Program. The findings showed that the community's role in the Kotaku Program was in the form decision making, indicating that approximately half the number heads families who actively participated in the Kotaku Program meetings and provided information about social, economic and environmental issues. The active role the community in the form of implementation/direct involvement in work activities, approaching the same number family heads as the community's role in decision making. The role community in the form of program utilization, shows a positive value. Most of the population already use clean water, drainage, roads and toilets. The aspect of waste management has not received public attention. The form of maintenance from the role of the community also shows a positive value, the impact on road cleanliness, drainage and toilets. The strategy for the sustainability of the role of the community after the implementation of the Kotaku Program is to continue the role of the community in collaboration with non-governmental organizations (NGOs) and utilize village assistance, in the form of maintaining environmental cleanliness, from aspects of waste, drainage, toilets and improving waste management activities.

**Keywords:** *The role of community, Slumless city Program, Kotaku.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Program yang yang dilaksanakan pemerintah dalam menangani kawasan kumuh di Indonesia adalah melalui pogram Kota Tanpa Kumuh. Kementerian PUPR pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten majene melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), untuk peningkatan kualitas hunian. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program yang di laksanakan sacara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi. Program ini menjadi basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan (Pedoman Umum Program Kotaku, 2016).

Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sudah menangani pemukiman kumuh dengan berbagai macam cara yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah. Salah satu model penanganan lingkungan kumuh ini adalah penataan berbasis kawasan yang

mengintegrasikan pemukiman kumuh dengan lingkungan sekitarnya sebagai satu kawasan, artinya mengintegrasikan dengan kegiatan lingkungan di sekitarnya (sistem kota) baik aktivitas ekonomi, lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial. Dengan perencanaan model ini, diharapkan kawasan kumuh akan berkembang secara berkelanjutan dan saling mendukung dengan potensi-potensi perkembangan yang ada disekitarnya.

Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Pangali-ali memiliki luas sebesar 17,20 Ha, termasuk dalam kategori kumuh berat terletak di wilayah pesisir yang sebagian besar adalah hunian nelayan, kategori berpenghasilan rendah (MBR). Mayoritas masyarakat di kawasan ini menjadikan tepian pantai sebagai tempat pembuangan sampah, serta tidak memiliki MCK yang dimana masyarakat pesisir melakukan pembuangan tinja di pesisir pantai, sehingga kawasan tersebut mengalami penurunan kualitas serta bahu jalan digunakan sebagai kegiatan masyarakat untuk berjualan. Oleh sebab itu merupakan kawasan prioritas dalam program kotaku Kabupaten Majene. Dengan luas wilayah kumuh 7,45 Ha, (Keputusan Bupati Majene Nomor 166/HK/KEP-BUP/II/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Majene). Khususnya di Lingkungan Cilallang tidak terlepas dari peran serta masyarakatnya, di karenakan peran dan kerja sama merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan.

Berdasarkan isu tersebut, maka perlu dikaji bentuk dan peran masyarakat dan menyusun strategi keberlanjutan peran masyarakat dalam purna program kota tanpa kumuh di permukiman pesisir Kelurahan Pangali-ali Kabupaten Majene.

### **B. Rumusan Masalah**

Salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan khususnya program Kota Tanpa Kumuh adalah peran masyarakat didalamnya baik saat program berjalan dan saat program tersebut telah terlaksana. Permukiman Lingkungan Cilallang sebagai salah satu kawasan kumuh yang telah dilaksanakan program Kota Tanpa Kumuh atau telah menjadi purna program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Majene. Peran masyarakat Lingkungan Cilallang diharapkan dapat berlanjut tidak hanya sebatas saat program berjalan. Peran masyarakat diperlukan dalam menjaga dan memelihara komponen dari hasil-hasil program tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan peran masyarakat dalam program Kota Tanpa Kumuh di kawasan permukiman pesisir Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kabupaten Majene?
2. Bagaimana strategi keberlanjutan peran masyarakat purna pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di kawasan permukiman pesisir Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kabupaten Majene?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis bentuk dan peran masyarakat dalam program Kota Tanpa Kumuh di kawasan permukiman pesisir Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kabupaten Majene.
2. Untuk menentukan strategi keberlanjutan peran masyarakat purna pelaksana program Kota Tanpa Kumuh di kawasan permukiman pesisir Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kabupaten Majene.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang didapat dari penelitian ini ialah dapat dikelompokkan ke dalam manfaat untuk akademis dan praktik. Manfaat-manfaat yang didapat di dalam tiap bidang tersebut ialah;

1. Manfaat akademik pada Prodi Manajemen Perkotaan, bahwa di dalam penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan menjadi tambahan kajian ilmu pengetahuan dan menjadi bahan kajian ilmu dan menambah referensi yang berhubungan dengan manajemen perkotaan khususnya bagi peneliti lanjutan yang fokus mengkaji tentang strategi peningkatan peran masyarakat.
2. Manfaat bagi pemerintah daerah, memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Majene sebagai bahan pertimbangan dan

rekomendasi terhadap program pembangunan yang berbasis strategi peningkatan masyarakat.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, adalah:

#### **1. Lingkup Wilayah Studi**

Lingkup wilayah studi difokuskan dikawasan deleniasi kumuh di wilayah pesisir Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali Kabupaten Majene yang telah menerima program Kotaku semenjak tahun 2018 dan memiliki luas sebesar 7,45 Ha (Berdasarkan SK Bupati No. 1583/HK/KEP-BUP/VIII/2017)

#### **2. Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi dari penelitian ini mencakup pada strategi peningkatan peran masyarakat wilayah pesisir pada program kotaku Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali Kabupaten Majene.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Permukiman**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa:

- a. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
- b. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- c. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

#### **B. Peran Masyarakat**

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), peran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa

keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Peran masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa peran merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Peran juga memiliki pengertian “*a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*” (Deepa Naryan, 1995), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) peran masyarakat dalam perawatan perumahan dan permukiman dapat dalam bentuk keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang

partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Menurut Isbandi (2007: 27) peran masyarakat dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. yang memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

### **C. Bentuk dan Tipe Keterlibatan/peran Masyarakat**

Ada beberapa bentuk peran masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu peran dalam bidang financial, peran dalam mengeluarkan tenaga, serta keterampilan, dan buah pikiran, peran sosial, peran dalam proses pengambilan keputusan, dan peran representatif.

Dari berbagai bentuk peran yang telah disebutkan diatas, peran dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk peran yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk peran yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk peran yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk peran yang tidak nyata adalah seperti buah pikiran, peran sosial, pengambilan keputusan dan peran representatif.

Peran berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan

pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. peran sosial diberikan oleh sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan peran representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Effendi dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 37), peran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan terbagi atas vertikal dan horizontal.

Disebut vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Peran semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D.(2009: 37), Peran masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “non fisik dan fisik”. fisik adalah masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha- usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan non fisik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Berdasarkan bentuk-bentuk peran yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe peran yang diberikan masyarakat.

Tipe masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan peran yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasi peran masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu pasif/manipulatif, dengan cara memberikan informasi, melalui konsultasi, untuk insentif materil, fungsional, interaktif, dan *self mobilization*.

#### **D. Macam-macam Peran dalam Masyarakat**

Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 39-40) membedakan peran menjadi empat jenis, yaitu pertama, peran dalam



pengambilan keputusan. Kedua, peran dalam pelaksanaan. Ketiga, peran dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, peran dalam evaluasi. Keempat jenis peran tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D., 2009: 39). Dengan demikian peran masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Siti Irene Astuti

D. (2009: 39), ruang lingkup dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Peran masyarakat dalam pengambilan manfaat ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Peran masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Secara singkat peran menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 40) dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

Tahap pelaksanaan program perani antara lain;

1. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
4. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

## **E. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

### **1. Latar Belakang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Program Kotaku mempunyai kepanjangan yaitu Program Kota Tanpa Kumuh, program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan. Program Kotaku telah berlangsung sejak tahun 2015 dan sesuai perencanaan akan berakhir pada tahun 2020 (Farida, 2016).

Program Kotaku merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh di perkotaan pada tahun 2016-2020 (Farida, 2016).

Program Kotaku menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota

serta Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan (Farida, 2016).

Merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk berfokus dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kumuh dengan yang dilaksanakan pada 34 provinsi yaitu yang tersebar pada dua ratus enam puluh sembilan kota yang terdiri dari kelurahan 11.067 berharap wilayah kumuh di perkotaan menjadi nol persen berkomitmen untuk berusaha merubah permukiman yang tergolong kumuh bisa berubah menjadi permukiman yang layak huni dan terwujudnya “Gerakan 100-0-100”, yang dimaksudkan adalah tersedianya seratus persen akses dan tersedianya air bersih, nol persen permukiman kumuh dan seratus persen tersedianya akses sanitasi yang layak. Kebijakan dan arah pembangunan Dirjen Cipta Karya yaitu pembangunan sistem, fasilitas pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas.

Program Kotaku menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota serta Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dan telah melakukan kegiatan perbaikan dan pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Nanti berharap agar

permukiman itu bisa terwujud secara fisik, ekonomi dan sosial dengan baik. Secara fisik bisa membuat pembangunan fisik, secara ekonomi juga bisa meningkatkan kesejahteraan finansial dan secara sosial juga bisa merubah perilaku terbiasa hidup bersih.

## **2. Pengertian Kotaku ( Kota Tanpa Kumuh)**

Perencanaan penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ialah program-program rencana yang diimplementasikan secara nasional menjadi kebutuhan yang mendesak, atau dasar terhadap penanganan kumuh yang menyinergikan beberapa sumber pendanaan dan juga sumber daya, baik dari masyarakat, pihak swasta, pemerintah kota/kabupaten, provinsi, pusat dan juga beberapa pemangku kepentingan yang lainnya juga. Tujuan dari Perencanaan penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ialah untuk membentuk dan membangun system yang secara kolaboratif menangani masalah permukiman yang kumuh, dengan melibatkan pemerintah daerah yang berperan sebagai pemimpin dan berkerja sama dengan para pemangku kepentingan baik dalam hal pengimplementasian dan juga perencanaan. Perencanaan penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tersebut dapat menjadi panggung kolaborasi dalam mendukung dan menyelenggarakan penanganan terhadap permukiman yang kumuh sekitar seluar 38.431 Ha yang dilaksanakan secara berangsur-angsur melalui peningkatan kapabilitas masyarakat dan pemerintah daerah, pengembangan pelayanan dasar dan infrastruktur pada tingkatan kota ataupun masyarakat, perencanaan,

penguatan kelembagaan, dan juga pendampingan teknis untuk mendukung terpenuhinya RPJMN 2015-2019, ialah menciptakan kota tanpa kumuh.

Berkenaan dengan Perumahan dan Kawasan permukiman yang termaktub di dalam UU No 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa permukiman yang kumuh ialah wilayah permukiman yang tidak layak untuk dihuni yang disebabkan oleh tingkat kepadatan, ketidakberaturan, kualitas, infrakstruktur bangunan yang tidak sesuai berdasarkan pada syarat-syarat bangunan yang layak, sementara itu Perumahan Kumuh ialah perumahan-perumahan yang memiliki kualitas fungsi yang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.

Berdasarkan uraian definisi yang telah dijelaskan di atas tersebut, maka dapat dirumuskan bahwalarakteristik-karakteristik dari permukiman yang kumuh dan perumahan kumuh yang berdasarkan terhadap aspek-aspek fisik sebagaimana berikut ini:

1. Kondisi infrastruktur bangunan yang tidak melengkapi syarat, memiliki kepadatan tinggi dan tidak teratur.
2. Keadaan fisik sarana dan prasarana tidak sesuai dengan syarat sarana dan prasarana. Khusus untuk bidangbatasan sarana prasarana dan keciptakaryaan, ialah sebagaimana berikut ini:
  - a. Jalan akses yang ada pada lingkungan tersebut;
  - b. Drainase yang ada di dalam lingkungan tersebut;
  - c. ketersediaan air minum dan air bersih di lingkungan tersebut;
  - d. Pengelolaan terhadap sampah-sampah yang dihasilkan;

- e. Pengelolaan terhadap air limbah;
- f. Pengamanan terhadap terjadinya kebakaran dan;
- g. Ruang terbuka publik.

Karakteristik-karakteristik fisik tersebut dijadikan sebagai dasar terhadap perumusan indikator dan kriteria terhadap gejala-gejala kumuh di dalam proses pengidentifikasian lokasi permukiman dan perumahan yang kumuh. Sementara itu, karakteristik-karakteristik non fisik yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah kepastian berusaha, kepastian bermukim, perilaku masyarakat, dan juga lain sebagainya.

### **3. Tujuan Program Kotaku**

Tujuan Program kotaku adalah perbaikan dan pembangunan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkotaan. Pelaksanaan Program kotaku adalah dengan berbasis masyarakat sehingga dibutuhkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Program KOTAKU memiliki 3 pendekatan yaitu yang pertama

1. Pendekatan kolaborasi sinergis, yang maksudnya adalah melakukan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah daerah, swasta dan termasuk penguatan City Changer dan pokja dan permukiman kota.

2. pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang maksudnya adalah pembangunan tersebut melibatkan masyarakat secara langsung dan perubahan perilaku masyarakat menjadi hal yang penting dan revitalisasi peran BKM yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam percepatan penanganan kumuh di wilayah.
3. Pendekatan Tridaya yaitu kegiatan penanganan kumuh maupun mencegahnya agar wilayah kumuh tidak semakin meluas, melalui sinergi penanganan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal dan penanganan sosial (aturan bersama, perilaku hidup bersih dan sehat) (Farida, 2016).

Tujuan pelaksanaan perencanaan program Kota tanpa Kumuh dapat terwujud dengan:

Semakin sempitnya permukaan yang kumuh

- a. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) pada tingkat kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukaan yang kumuh berfungsi dengan tepat;
- b. Terbentuknya rancangan-rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang perumahan dan permukiman yang kumuh pada tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang



tersusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- c. Semakin berkembangnya jumlah penghasilan yang diperoleh oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan ketersediaan kegiatan dan infrastruktur peningkatan masyarakat untuk mendukung meningkatnya kualitas dan mutu kawasan permukiman yang kumuh;
- d. Terimplementasikannya aturan-aturan secara kolektif sebagai bentuk upaya terhadap perubahan perilaku gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat

Indikator terwujudnya program dan tujuan pengembangan peningkatan perkotaan tanpa kumuh yaitu berdasarkan pada pengentasan atau penyelesaian permukiman yang kumuh di perkotaan dan diatur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Berikut ini adalah indikator-indikator yang harus terpenuhi;

1. Semakin berkembangnya akses masyarakat terhadap pelayanan dan infrastruktur perkotaan pada kawasan yang tidak bersih berdasarkan pada kriteria-kriteria yang ditentukan, diantaranya adalah air bersih/minum; pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran, drainase, pengelolaan air limbah dan tata ruang public.
2. Semakin berkurangnya kawasan yang kumuh dan terciptanya akses pelayanan perkotaan dan infrastruktur yang lebih baik.

3. Berfungsi dan terbentuknya kelembagaan seperti POKJA PKP untuk mendukung terwujudnya program KOTAKU pada tingkat kota/kabupaten.
4. Pengguna terhadap manfaat yang ditimbulkan merasa senang dan puas terhadap peningkatan mutu kualitas pelayanan perkotaan dan infrastruktur pada kawasan yang kumuh. Semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan pada masyarakat dengan mendukung kehidupan yang terus menerus terhadap wilayah kumuh tersebut.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dalam aspek-aspek tertentu. Penelitian ini memiliki persamaan atau keselarasan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Di antara persamaan dan perbedaan tersebut dapat di lihat pada tabel 2.1 berikut

**Tabel 1. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu**

Sumber	Latar Belakang	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil
Afwah Ulya Partisipasi Masyarakat Dalam program Tanpa Kumuh KOTAKU) Di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang  (Jurnal Pengembangan Masyarakat 2018)	Partisipasi masyarakat dan faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam program kotaku. Partisipasi Masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program kotaku dan merupakan cerminan dalam pemberdayaan masyarakat dalam wujud pembangunan focus pada aspek manusia dan lingkungan agar manusia bias nyaman dengan lingkungan yang bersih dan layak huni.	Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam program kotaku di kelurahan krobokan kecamatan semarang barat Dan untuk mengetahui faktor penghambat dan factor pendorong partisipasi masyarakat dalam program kotaku.	Metode deskriptif evaluatif. Teknik pengambilan data, yakni: wawancara, penelusuran pustaka dan pengamatan di lapangan	1. Tingkat partisipasi masyarakat (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian). 2. Faktor Pengaruh: pendidikan, pendapatan, lama tinggal, luas halaman, keadaan lingkungan, persepsi masyarakat dan sikap terhadap lingkungan.	Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dalam beberapa ketelibatan seperti: Masyarakat ikut dilibatkan dalam mengambil keputusan dan masyarakat dalam pelaksanaan terlibat dalam kontribusi tenaga dalam pembangunan proyek. partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilihat dalam beberapa keterlibatan seperti monitoring pelaksanaan program serta mengevaluasi masalah masalah yang timbul. faktor yang mendukung dan penghambat dalam program kotaku adalah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program sedangkan penghambat kurang

Sumber	Latar Belakang	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil
					pahaminya masyarakat akan pembangunan yang baik.
Ahsanul Kholqi  Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Peran Masyarakat (Studi Kasus program kotaku tanpa kumuh di kelurahan karangwaru)  (eJournal Ilmu Pemerintahan, 2018)	Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.	Untuk mengetahui dan menganalisis Peran masyarakat bisa menjadi solusi alternative untuk menangani masalah permukiman kumuh yang ada di Indonesia. merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para	Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer didapat melalui wawancara dengan narasumber yang terkait langsung dengan topik penelitian dan data sekunder didapat melalui observasi, dokumentasi dan melalui bacaan baik artikel, jurnal dan penelitian sejenis.	Peran masyarakat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) meliputi : a. Peran masyarakat dalam persiapan b. Peran masyarakat dalam perencanaan program c. Peran masyarakat dalam Pelaksanaan d. Peran masyarakat dalam tahapan Keberlanjutan	Pengembangan diatas tentu menjadi bukti bahwasannya program kotaku tidak hanya mampu merevitalisasi sungai buntung namun bisa menjadi pemicu agar terciptanya genbrakan – gebrakan baru guna untuk megentaskan permukiman kumuh di wilayah karangwaru. Bisa dikatakan ini adalah hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui program kotaku. Tentunya keberhasilan masyarakat karwangwarusehingga bisa mengembangkan program didorong oleh modal sosial yang terciptas selama proses

Sumber	Latar Belakang	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil
		pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan peran masyarakat.			penyelenggaraan program kotaku. Hambatan terbesar dalam program Kotaku di keluarahan Karangwaru adalah masalah keterbatasan dana. Biaya pembangunan infrastuktur tentunya memerlukan dana yang sangat besar. Karena dana ini sangat terbataslah yang menyebabkan pelaksanaan program Kotaku.
Taufiq Ismail Peran Kotaku dalam memberdayakan kelompok swadaya masyarakat.  (Pengembangan Masyarakat 2021)	Saat ini peningkatan kualitas masyarakat semakin meningkat. Baik dari segi ekonomi, social kesehatan serta lingkungan masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang masih mengalami kemiskinan. Kemiskinan terjadi terutama pada masyarakat wilayah perkotaan. Kemiskinan masih menjadi salah satu	Untuk mengetahui Peran Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Memberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta menjadi bahan masukan dan evaluasi, sehingga dapat memberdayakan kelompok swadaya	Penelitian kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan dilapangan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati menggunakan pendekatan penelitian	Faktor mempengaruhi kondisi ekonomi sosial dan budaya memberdayakan masyarakat dalam peran program kota tanpa kumuh.	Peningkatan ekonomi masyarakat yang telah tergabung sebagai anggota KSM dengan jumlah pendapatan yang ada sudah banyak perubahan masyarakat Selain itu program KOTAKU juga mendirikan sekolah gratis untuk anak usia dini, dan juga setelah program pendidikan sekolah

Sumber	Latar Belakang	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil
	masalah yang banyak terjadi pada negara berkembang.Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah kekeliruan dalam strategi besar dan kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional	masyarakat melalui program KOTAKU	deskriptif untuk mengetahui Peran Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Memberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)		gratis ini ditiadakan, namun tidak dibiarkan begitu saja yakni diganti dengan penyuluhan pendidikan dengan cara sosialisasi kekelompok masyarakat sehingga mereka mendapatkan pengetahuan. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, dapat dilihat program kotakku telah membangun jalan yang layak bagi masyarakat serta membangun RTH mempermudah akses jalan penghubung selain itu juga menyediakan air bersih..

## G. Kerangka Pikir

Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Pangali-ali memiliki luas sebesar 17,20 Ha, termasuk dalam kategori kumuh berat terletak di wilayah pesisir yang sebagian besar adalah hunian nelayan, kategori berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah dalam menangani kawasan kumuh di Indonesia adalah melalui Program Kotaku.

Peran Masyarakat merupakan sasaran utama dalam pencapaian Program Kotaku.

